

KEGIATAN DPR-RI

MINGGU KEDUA APRIL 2012

Mulai tanggal 13 april 2012 DPR RI menjalani masa reses sampai dengan 13 mei. Laporan kegiatan pada edisi ini akan menggambarkan pelaksanaan fungsi Legislasi dalam bentuk laporan hasil pembahasan RUU tentang Perubahan UU no 10 tahun 2008, pelaksanaan fungsi Anggaran dan pelaksanaan fungsi Pengawasan, yang telah disampaikan dalam Pidato Penutupan ketua DPR RI.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Alie

Pelaksanaan Fungsi Legislasi

1. RUU Tentang Perubahan UU no 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Rapat Paripurna tanggal 12 April telah menyelesaikan pembahasan atas RUU tersebut dalam pembicaraan tingkat II. Penjelasan dari UU ini mengatakan, bahwa Perubahan atas UU Pemilu ini di perlukan untuk penyempurnaan sistem Pemilu DPR, DPD, DPRD sebagai aktualisasi dari penyelenggaraan kehidupan bernegara dan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip – prinsip demokrasi dan memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu dari waktu ke waktu secara konsisten. Upaya memperbaiki penyelenggaraan Pemilu ini merupakan bagian dari penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) serta upaya mewujudkan tata pemerintahan presidil yang efektif. Dengan perubahan ini diupayakan bahwa proses demokrasi tetap berlangsung melalui pemilu yang lebih berkualitas dan berjalan dengan lebih baik, terkelola dan terlembaga.

2. Agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan lebih berkualitas.

3. Sejak pembahasan RUU ini yang dilakukan dari Panja sampai Timus/Timsin, telah terjadi perubahan yang sangat signifikan, lebih dari 50 % dari substansi RUU. Perubahan tersebut berarti sudah melewati batas ketentuan UU no 12 tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Per Undang undangan. oleh karena itu disepakati bahwa RUU ini merupakan “RUU Penggantian” guna memudahkan pengaturannya.

4. Dalam pembahasan RUU yang cukup lama di mulai sejak tanggal 6 oktober 2011 sampai dengan 12 april 2012 terjadi berbagai perubahan, penyesuaian dan penambahan substansi.



RUU perubahan ini meliputi XXV bab dan 325 pasal. Ada empat materi yang cukup memakan waktu dan energi didalam pembahasan dan tidak tuntas diselesaikan oleh panitia khusus. Empat materi krusial selanjutnya diselesaikan pada rapat Paripurna pembicaraan tingkat II pada tanggal 11 dan 12 April. Empat materi krusial yaitu : (1) Sistem Pemilu; (2) Parliamentary Treshold (PT); (3)Alokasi kursi tiap Daerah Pemilihan; (4) Konversi suara menjadi kursi.

5. Selain itu rapat kerja Pansus dengan Pemerintah tanggal 10 april juga mengangkat beberapa materi lainnya oleh fraksi fraksi antara lain : (1)Pembatasan Belanja Kampanye apapun sistem pemilunya; (2)Ketentuan terhadap metode pernggabungan partai politik untuk dapat

mengikuti pemilu guna menghindari praktek yang bersifat transaksional; (3)Adanya keinginan kuat dari fraksi fraksi agar UU tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dapat berlaku untuk beberapa kali penyelenggaraan pemilu.

6. Empat materi krusial yang akhirnya diserahkan pada rapat Paripurna, akhirnya diputuskan melalui aklamasi dan dengan suara terbanyak / voting sebagai berikut; **(1)Sistem Pemilu diputuskan dengan proporsional terbuka; (2) Parliamentary Treshold (PT) 3,5%, berlaku secara nasional; (3)Alokasi kusi perdaerah pemilihan 3-10 untuk DPR dan 3-12 untuk DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota; (4)Konversi suara menjadi kursi diputuskan memakai metode kuota murni.**

7. Dengan selesainya pembahasan atas RUU ini maka komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat segera bersiap melaksanakan tugas dalam menetapkan pentahapan pemilu Legislatif 2014. Ketua DPR mengharapkan bahwa Pemilu 2014 dapat berjalan dengan lebih baik yang akan menghasilkan anggota DPR, DPD dan DPRD dengan derajat keterwakilan yang tinggi, dapat berlangsung dengan lebih murah dari segi biaya, lebih mudah dalam pelaksanaannya dan hasilnya lebih berkualitas.

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto,S.Sos; Iwan Armanias; Suciati,S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam masa sidang ke III sebagaimana dilaporkan ketua DPR dalam Pidato Penutupan sidang, ada beberapa masalah yang mendapat perhatian dewan diantaranya :

1. **Setifikasi guru.** Sebagai tenaga profesional, guru mempunyai kedudukan penting dalam jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikasi guru yang sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2007 hingga saat ini dan diharapkan selesai pada tahun 2014, merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas guru dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka melalui tunjangan profesi.

Dewan meminta agar sertifikasi guru dapat dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundangan serta juklak yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan perlunya ditingkatkan pengawasan atas pelaksanaan sertifikasi tersebut.

2. **Masalah narkoba,** Masalah narkoba yang marak dalam pemberitaan media massa akhir-akhir ini tak luput pula dari perhatian kita. Meningkatnya konsumsi narkoba dan peredarannya ditengarai telah merambah, tidak saja kepada masyarakat, tetapi juga terhadap sejumlah oknum aparat penegak hukum. Hal ini sangat membahayakan sekaligus memprihatinkan. Keseriusan dan tindakan konkret dari penegak hukum, perlu terus didorong guna menyelamatkan generasi muda dari bahaya ini. Perlu dilakukan pemutusan mata-rantai jaringan narkoba yang sudah begitu canggih dan eksis di setiap lapisan masyarakat.

3. **Kecelakaan Lalulintas darat.** Kecelakaan lalu lintas darat yang cenderung meningkat akhir-akhir ini, mendapatkan perhatian masyarakat. Jumlah korban sangat memprihatinkan. Dari catatan, selama tiga bulan terakhir, telah terjadi 14 kecelakaan dalam kategori besar dengan jumlah korban meninggal sekitar 72 orang dan 177 cedera berat dan ringan. Belum lagi kecelakaan pengendara sepeda motor yang juga meminta korban. Dengan angka kematian yang begitu tinggi, kita patut bertanya, betapa buruknya manajemen transportasi darat, baik berkaitan dengan sarana jalan, tidak tersedianya lintasan Kereta Api (KA), rambu-rambu lalu lintas yang tidak memadai, dan angkutan umum yang tidak layak jalan, termasuk ketidakdisiplinan pengendara. Sudah saatnya otoritas perhubungan darat melakukan upaya untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan manajemen transportasi.

4. **Hasil Pemeriksaan semester II tahun anggaran 2011 BPK RI.** Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, BAKN dan Komisi-Komisi DPR-RI telah dan akan mencermati Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun Anggaran 2011 BPK-RI yang telah diserahkan pada tanggal 4 April yang lalu. Laporan BPK tersebut terdiri atas pemeriksaan kinerja 143 objek pemeriksaan, yaitu 30 objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat, 56 objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Daerah, 9 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN, 29 objek pemeriksaan di BUMD, dan 19 objek pemeriksaan di lingkungan BLU.

Ketua BPK-RI melaporkan bahwa, meskipun berbagai kemajuan telah dicapai dalam pengelolaan keuangan negara oleh Pemerintah, namun hasil Pemeriksaan Semester II TA 2011 menggambarkan masih terdapat berbagai kelemahan dalam pengelolaan keuangan negara dan memerlukan perbaikan. Oleh karenanya, Pimpinan Dewan mengharapakan BAKN dapat

meneliti, mengkaji dan mengevaluasinya, untuk selanjutnya disampaikan kepada Komisi-Komisi untuk ditindaklanjuti.

Bidang Anggaran

Pasca disahkannya RUU Perubahan APBN Tahun Anggaran 2012 menjadi undang-undang oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna tanggal 30-31 Maret 2012, dimana keputusan diambil secara voting mengenai Pasal 7 Ayat 6(A) menimbulkan konsekuensi bagi Pemerintah dalam menentukan kebijakan anggaran (APBN-P 2012).

Pasal 7 Ayat 6(A) menyatakan:

“Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, kecuali dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dengan kebijakan pendukungnya”,

dan penjelasan Pasal 7 Ayat 6(A):

“Yang dimaksud dengan harga rata-rata minyak mentah Indonesia dalam kurun waktu berjalan adalah realisasi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama 6 (enam) bulan terakhir”

menimbulkan perubahan kebijakan anggaran yang akan diambil oleh Pemerintah.

Dalam pengajuan RUU Perubahan APBN TA 2012, Pemerintah mengajukan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp1.500,0/liter dari Rp4.500/liter mulai 1 April 2012, berkaitan dengan beban subsidi energi yang membengkak dalam APBN 2012 akibat naiknya harga minyak mentah/ICP yang menyentuh harga psikologis yaitu diatas US\$100/barel.

Keputusan Pasal 7 Ayat 6(A) tersebut berimplikasi:

1. Pemerintah tidak dapat menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp1.500/liter pada tanggal 1 April 2012.
2. Tertundanya pelaksanaan anggaran program kompensasi subsidi sebesar Rp30,6 triliun yang terdiri dari:
 - a. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp17,1 triliun (termasuk *safeguarding*),
 - b. Kompensasi angkutan umum sebesar Rp5,0 triliun (termasuk *safeguarding*),
 - c. Bantuan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan sebesar Rp7,9 triliun (termasuk *safeguarding*), dan
 - d. Program Keluarga Harapan (PKH) Rp0,6 triliun (termasuk *safeguarding*)
3. Pemerintah harus mencari sumber anggaran untuk belanja subsidi BBM hingga harga BBM bersubsidi disesuaikan dengan kenaikan harga minyak mentah/ICP.
4. Dengan asumsi harga minyak mentah/ICP dalam UU APBN-P 2012 sebesar US\$105/barel, maka Pemerintah berwenang menyesuaikan harga BBM bersubsidi jika realisasi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama 6 (enam) bulan terakhir telah mencapai US\$ 120,75/barrel atau kurang dari/ sama dengan US\$89,25/barrel.

Defisit anggaran dalam APBN-P 2012 naik menjadi sebesar Rp190.105,3 miliar (2,23% PDB) dari Rp124.020,0 miliar (1,5% PDB) dalam APBN 2012. Defisit ini akan dibiayai dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp194,5 triliun dan luar negeri sebesar negatif Rp4,4 triliun.

Hasil Kunlap Komisi X DPR, Pengamanan UN Berlebihan

Terkait pengamanan soal UN yg melibatkan tentara dan kepolisian Anggota komisi X DPR Nasruddin (F-PG) mengatakan bahwa hal ini terlalu berlebihan dan perlu ditinjau ulang.



Tim Komisi X DPR saat meninjau pelaksanaan UN ke-beberapa Sekolah Menengah Umum di Bali

“Pengamanan soal UN yang melibatkan tentara dan kepolisian, menurut saya sangat berlebihan, ini ada apa? Masa pemerintah tidak percaya kepada aparat pendidik, seperti kepala sekolah, guru dan pengawas sekolah,” katanya saat meninjau pelaksanaan UN ke-beberapa Sekolah Menengah Umum di Bali, Senin (16/4).

Ia menambahkan, semestinya pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan harus percaya kepada aparat pendidiknya, karena mereka itu orang2 pilihan.

“Tanamkan kejujuran dan rasa penuh tanggung jawab ke aparat pendidik atau mereka, maka pelaksanaan UN pasti akan berjalan dengan baik, bukan malah melibatkan aparat penegak hukum, yg akhirnya akan membuat siswa ketakutan” tegasnya.

Ketika ditanya, jika tindakan ini dilakukan, karena khawatir soal ujian akan bocor, ia menjelaskan, tahun lalu memang, kelulusan hanya dilihat dr UN saja, namun sekarang siswa di-

nyatakan lulus dapat dilihat dr 4 faktor, moral, rapot, ujian sekolah, dan UN.

“Dari 3 aspek inilah, selain UN, yang sudah dipersiapkan sekolah untuk membantu kelulusan anak didik, jadi UN tidak perlu lagi dilakukan pengamanan seperti mau perang saja,” ujarnya.

“Naskah dititipkan di polsek, di koramil, di kodim, maksudnya apa, jangan terlalu berlebihan, dan ini amat naif, kok negara seperti ini,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah dalam pelaksanaan UN ini, seharusnya menyerahkan semuanya kepada sekolah, percayakan kepada aparat pendidik arti kejujuran, tanamkan aturan tegas, tegakkan aturan, dan siapapun yang melanggar proses secara hukum, semuanya pasti akan berjalan dengan baik

Apresiasi UN Bali Lancar

Pada kesempatan itu, Komisi X DPR mengapresiasi keberhasilan

Pemerintah Provinsi Bali atas kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang serentak dilaksanakan Senin (16/4). “Pelaksanaan UN khusus untuk Bali cukup baik, tertib dan tidak ada persoalan, namun tetap ada beberapa masukan diantaranya mengenai perlu adanya peningkatan kualitas pelaksanaannya,” kata pimpinan rombongan Komisi X DPR Nasruddin usai meninjau pelaksanaan UN di SMA dan SMK di Denpasar, Bali.

Ia menambahkan, pemerintah perlu mengurangi tingkat pengamanan yang berlebihan di dalam pengambilan dan pendistribusian naskah-naskah di sekolah-sekolah.

“Untuk tahun ini, kelihatannya secara demonstratif terlalu berlebihan, dan menurut saya ada kecenderungan pemerintah tidak percaya kepada aparatnya sendiri, seperti dinas-dinas di daerah, kepala sekolah dan pengawas sekolah,” jelas Politisi Partai Golkar ini.

Ia menambahkan, untuk kedepannya hal ini yang perlu ada perbaikan agar jangan terlalu seram, agar tidak mempengaruhi secara psikologis anak-anak yang akan ujian,” tegasnya.

Dikesempatan ini, Nasruddin juga mengapresiasi Pemprov Bali, terutama Gubernur Bali I Made Mangku Pastika, atas kepedulian yang sangat tinggi terhadap pendidikan di Bali, salah satu contohnya, Pemprov Bali sudah mengalokasikan bantuan pendidikan bagi siswa SMU.

“Pemerintah Pusat belum mengalokasikan BOS untuk SMU, namun Pemprov Bali sudah melakukannya, seperti dana 400 ribu/siswa pertahun untuk SMU dan 500 ribu/siswa pertahunnya untuk SMK, untuk SMK ditambah anggaran untuk praktek,” kata Nasruddin. Menurutnya, ini merupakan satu bukti bahwa pemerintah daerah Provinsi

Bali sangat peduli mendorong untuk pendidikan nasional.

Meninjau UN di Sumbar

Saat melakukan peninjauan ke Sumbar, Wakil Ketua Komisi X DPR Asman Abnur mengatakan, persoalan UN memang selalu menjadi perdebatan yang hangat di Komisi X saat rapat dengan Kementerian Pendidikan. “Kesepakatan terakhir antara pemerintah dan DPR adalah 60:40. Artinya nilai kelulusan seorang siswa didapat dari UN sebesar 60%, dan nilai ujian sekolah masing-masing sebesar 40%,” jelasnya saat tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi, Asman Abnur (F-PAN) melakukan peninjauan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat sekolah menengah atas di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (16/4) lalu.

Ketua tim mengungkapkan, selama ini UN menjadi momok bagi siswa dan orang tuanya. Bahkan kita dengar banyak sekali laporan mengenai kebocoran soal-soal UN ini di sejumlah daerah. Karena banyaknya persoalan dalam pelaksanaan UN ini, lanjutnya, ada sejumlah anggota dewan mengusulkan agar UN dihapus saja.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumbar dan jajaran Dinas Pendidikan telah mempersiapkan pelaksanaan UN sejak 3 bulan yang lalu. Untuk membantu para siswa mempersiapkan diri, Pemprov juga mengadakan beberapa kali try out dan bimbingan test soal-soal UN. “Selain mempersiapkan sarana dan pra sarana, Pemprov juga mengadakan try out dan bimbingan test bagi para siswa untuk melatih diri menghadapi soal-soal UN,” ungkap mantan Ketua Komisi X DPR ini

Pada kesempatan itu, Anggota Komisi X, Raihan Iskandar (F-PKS) dan Didi Wahidi (F-PKB) mempertanyakan peran perguruan tinggi dalam pelaksanaan UN tahun ini. Keduanya juga menanyakan apakah dengan sistem baru 60:40 ini pihak Universitas Andalas dapat menerima nilai UN sebagai syarat masuk.

Menjawab pertanyaan tersebut, Rektor Unand, Dr. Werry Dartta Taifur

mengatakan, Perguruan Tinggi sudah dilibatkan mengawasi UN mulai dari pencetakan soal sampai pemeriksaan hasil UN. Terkait syarat masuk PTN, dengan persentase 60% nilai UN, pihaknya belum bisa menentukan bisa atau tidaknya mengingat evaluasi pelaksanaan sistem ini belum dilakukan.

“Yang berlangsung sekarang kan belum dilakukan evaluasinya, kami akan menunggu hasil evaluasi tersebut. Secara proses sistem ini memang lebih baik dari tahun lalu, tapi untuk menentukan bisa tidak langsung diterima di PTN perlu evaluasi,” jelasnya.

Dra. Wellita, MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Padang, pada kesempatan tersebut mengusulkan agar UN diberlakukan tidak seragam tetapi berjenjang bergantung pada jenis sekolahnya, apakah sekolah regular atau Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). “Jadi tidak disamakan antara sekolah regular dengan sekolah khusus, karena fasilitas dan kurikulumnya berbeda,” ucap Wellita.

Selain meninjau SMA 1 Padang, tim Komisi X juga meninjau pelaksanaan UN di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Padang. Turut serta pada kunjungan kali ini anggota Komisi X, Muslim (F-PD), H. Sholeh Soe’aidy (F-PD), Rully Chairul Azwar (F-PG), Hj. Popong Otje Djunjuran (F-PG), Ferdiansyah (F-PG), Asdy Narang (F-PDI Perjuangan), Irsal Yunus (F-PDI Perjuangan), H. Raihan Iskandar (F-PKS), H.Tb. Soemandjaja (F-PKS), H. Dedi Wahidi (F-PKB), dan Nuroji (F-Gerindra).

Biaya Operasional Guru Pengawas Minim

Tim Kunjungan Lapangan Spesifik, Anggota Komisi X DPR RI Dedi S. Gumelar menemukan terdapat beberapa permasalahan di Sulteng, diantaranya, guru-guru pengawas dari satu sekolah yang mengawasi ujian di sekolah lain, belum mendapatkan biaya operasional pengawasan.

Selain itu, kenyataan di lapangan menunjukkan biaya operasional pengawasan dan pengawalan UN baik untuk guru-guru maupun aparat kepolisian masih dikeluarkan dari Ang-

garan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga dari anggaran sekolah sendiri.

Alasan Komisi X DPR melakukan kunjungan kerja ke kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) 15-16 April 2012 dikarenakan masih tingginya tingkat kegagalan UN di daerah tersebut serta memantau langsung pelaksanaan Ujian Nasional di SMA dan SMK di kota Palu.

“Untuk memantau penyelenggaraan UN, tim dari Komisi X terbagi di beberapa wilayah. Salah satunya di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) ini. Kami bertugas untuk memantau langsung kondisi pendidikan di Sulteng, karena berdasarkan data kementerian, tingkat kelulusan UN di Sulteng sangat rendah,” ujar Ketua tim Kunker Komisi IV ke Sulteng Syamsul Bahri.

Syamsul menambahkan, selain untuk memantau pelaksanaan UN, Komisi X juga ingin tahu bagaimana dengan standarisasi penilaian kelulusan, apakah hanya terpaku pada hasil UN atau ada kriteria lain.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulteng Sudarto mengatakan, kunjungan Komisi X ke Sulteng sangat memberi manfaat yang besar bagi pembangunan pendidikan di Sulteng. Sudarto mengatakan, UN seringkali menimbulkan kecemasan dan kerisauan bagi siswa dan orangtua siswa. Berkaitan dengan tingkat kelulusan, Sudarto mengatakan ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi.

“Hal pertama yang memengaruhi tingkat kelulusan UN adalah infrastruktur penunjang pendidikan. Selain itu, ketersediaan guru dan terakhir luas wilayah. Luas wilayah sulteng yang cukup besar dan banyak pulau sangat menjadi kendala, karena pada umumnya, guru-guru enggan ditempatkan di daerah terpencil, serta pembangunan sarana pendidikan di kepulauan agak sulit terealisasi.” Ujar mantan Bupati Banggai itu.

Kunjungan spesifik anggota komisi IV DPR RI dipimpin oleh Syamsul Bachri (F-PG) dengan anggota: Habibah Salahudin (F-PG), Diaz Gwijangge (F-PD), Tb. Dedy S. Gumelar (F-PDIP), Itet Tri-djajati Sumarijanto (F-PDIP), Rohmawi (F-PKS), serta Djamal Aziz (F-Hanura). (tim Parle)

Rasio Personil Kepolisian di Kalbar Masih Rendah

Perbandingan jumlah personil Kepolisian dibanding jumlah penduduk di wilayah provinsi Kalimantan Barat masih sangat rendah, yakni sekitar 1:1000 atau 1 orang anggota Polri melayani 1000 orang penduduk.



Ketua Tim Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edy (tengah)

Hal tersebut mengemuka saat pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Wakil Gubernur Kalimantan Barat beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (18/4).

Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya dalam sambutannya mengatakan menurut PBB rasio kepolisian berbanding jumlah penduduk yang ideal adalah 1:400. “jadi setiap 1 orang polisi melayani 400 orang penduduk,” jelas Wagub. Christiandy menambahkan, bahkan yang terendah di kab. Sekadau yaitu hanya 0,37% artinya setiap polisi harus melindungi lebih dari 2.700 penduduk.

Lebih lanjut Wagub menjelaskan, Kalbar memiliki karakteristik yang

khas dibanding wilayah lain, karena letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, hal itu menjadikan Kalbar berpotensi menjadi tempat terjadinya kejahatan trans nasional yang terorganisir, maupun yang bernuansa ekonomi, seperti illegal logging, illegal mining, maupun illegal fishing, juga human trafficking. Untuk itu dirinya meminta dukungan Komisi III dan pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan keberadaan dan kesejahteraan aparat di wilayah perbatasan.

Ketua Tim Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edy (F-PAN) mengatakan, persoalan pengelolaan perbatasan bukan tugas dan kewenangan Komisi III, tetapi karena pentingnya persoalan ini, Tjatur menegaskan, akan segera

menyampaikan persoalan perbatasan ini langsung kepada pimpinan DPR untuk meneruskan kepada presiden.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini, lebih lanjut menjelaskan, penduduk Kalbar yang terdiri atas multi etnis ini, memiliki potensi konflik yang cukup tinggi, namun jika semangat kebhinnekaan tetap dijunjung tinggi, dirinya yakin Kalbar akan menjadi daerah yang lebih maju di masa depan.

“Kita sangat yakin Bhinneka Tunggal Ika adalah sendi dasar dari terbentuknya republik ini. Jika kebhinnekaan dapat kedepankan, maka keamanan dan ketertiban di Kalbar ini bisa dijaga dengan baik, sehingga percepatan pembangunan bisa dilakukan,” tukasnya.

Tjatur mengatakan, Komisi III mendukung penuh pemda Kalbar untuk menjadikan provinsi ini aman, tertib, dan kondusif bagi jalannya pembangunan daerah.

Dalam diskusi, MH. Munsin, Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan provinsi Kalbar mengungkapkan, ada satu persoalan dalam pengelolaan perbatasan, yakni soal pembagian kewenangan. Persoalan perbatasan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tetapi pemerintah pusat tidak dapat menjangkau hingga ke pelosok perbatasan, sementara aparat di daerah tidak mendapat kewenangan dan anggaran. Munsin mengusulkan agar diatur kembali mengenai pendistribusian wewenang. “Jadi jelas mana kewenangan pusat, provinsi, maupun kabupaten,” jelasnya.

Usai pertemuan dengan Wagub Kalbar dan FKPD, tim Komisi III melakukan pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar dan Kepala Kepolisian Daerah Kalbar Brigjen Pol. Drs. Unggung Cahyono beserta jajarannya. (Rn.Tvp) foto:parle

DPR Tinjau Kesiapan Masyarakat di Bengkulu Hadapi Gempa Megathrust

Menurut Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah, DPR dengan fungsi pengawasannya berkepentingan memastikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPB) melaksanakan tugasnya mengedukasi masyarakat sesuai dengan program dan anggaran yang telah disetujui.

“DPR yang menyiapkan anggaran untuk pelatihan menghadapi bencana dan kami sekarang datang memastikan anggaran itu telah digunakan dengan baik oleh BNPB dan BPBD,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziah saat bertemu masyarakat desa Teluk Sepang, di Kelurahan Teluk Sepang, Bengkulu, Selasa (17/4).

Desa Teluk Sepang berpenduduk 800 KK, terletak hanya beberapa meter dari bibir pantai termasuk zona 1 kawasan siaga bencana gempa dan tsunami. Dalam kesempatan pertemuan di balai desa Tim Kunker Komisi VIII berkesempatan berdialog langsung dengan masyarakat, menanyakan pemahaman mereka terhadap bencana sekaligus kesiapan mengadapinya.

“Yang paling penting kita tahu kondisi wilayah kita rawan bencana gempa

Komisi VIII DPR mendesak pemerintah mempersiapkan masyarakat yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, termasuk di Bengkulu dalam menghadapi potensi terburuk munculnya gempa berkekuatan 8.9 SR yang diprediksi tsunami, yang disebut para peneliti sebagai Megathrust benar-benar terjadi.

dan tsunami, warga harus siap dan sigap menghadapinya kalau sewaktu-waktu terjadi,” lanjut politik FPKB ini. Ia juga meminta masyarakat menyampaikan permasalahan yang dihadapi agar upaya penyelamatan, mengurangi bahkan meniadakan korban pada saat bencana dapat dilakukan seoptimal mungkin.

Lurah Teluk Sepang, April Tomasya melaporkan salah satu kendala yang dapat menghalangi kelancaran proses evakuasi adalah minimnya sarana prasarana transportasi. Ia sudah mengusulkan perbaikan namun sejauh ini belum ditanggapi oleh aparat terkait.

Sementara itu Ketua Siaga Bencana Teluk Sepang Lopi menyampaikan ada 30 orang warga yang telah dilatih khusus memandu masyarakat dalam proses evakuasi. Beberapa kali simulasi bencana telah dilakukan untuk melatih kesiapan terutama menyelamatkan anggota masyarakat yang rentan seperti ibu hamil, lansia

dan penyandang cacat.

Menurutnya, salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat adalah minimnya alat komunikasi. “Kami butuh radio komunikasi yang lebih baik apalagi hp disini tidak ada sinyal. 5 hari lalu terjadi gempa, kami kesulitan berkomunikasi,” paparnya. Sebagai nelayan ia juga berharap Komisi VIII DPR dapat memberikan dukungan kepada masyarakat Teluk Sepang. “Kami ingin membuat tangkapan di laut lebih bernilai secara ekonomi.”

Anggota Komisi VIII dari FPAN Dewi Coryati meminta warga membuat kelompok usaha bersama sesuai profesi masing-masing. Kehadiran kelompok ini memudahkan dalam memberikan bimbingan usaha termasuk modal kerja. “Kita akan mengarahkan Dinas Kessos Provinsi Bengkulu mendukung sehingga upaya masyarakat Teluk Sepang menjadi desa siaga sekaligus desa tangguh secara ekonomi bisa terwujud,” jelasnya. (iky) foto:parle



Tim Komisi VIII DPR saat melakukan kunjungan kerja ke desa teluk sepang Bengkulu

Data Pemilih Harus Diserahkan Paling Lambat 16 Bulan



Ketua Pansus RUU Pemilu Arif Wibowo saat menyerahkan laporannya kepada Pimpinan DPR RI

Terkait dengan penyediaan data kependudukan, terdapat tiga bentuk yaitu : (a) data agregat kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota; (b) data penduduk potensi pemilih pemilu sebagai bahan bagi KPU menyusun daftar pemilih; dan (c) data WNI yang bertempat ting-

gal di luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan daerah pemilihan dan daftar pemilih sementara.

Demikian penjelasan Ketua Pansus RUU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Arif Wibowo dalam laporannya kepada Rapat Paripurna DPR RI beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut dia mengatakan, data kependudukan harus sudah diserahkan

kan paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. Selanjutnya data tersebut disinkronisasikan oleh Pemerintah bersama KPU dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri.

Tahapan berikutnya, paparnya adalah proses pemutakhiran data pemilih yang harus diselesaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah diterima data penduduk potensial pemilih pemilu. Tahapan dilanjutkan dengan penyusunan daftar pemilih yang disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga atau nama lain melalui proses yang sistematis hingga ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap.

Dikatakan, dalam hal terdapat warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, daftar pemilih tetap, atau daftar pemilih tambahan, KPU Provinsi melakukan pendaftaran dan memasukkannya ke dalam daftar pemilih khusus. (ddg) foto:wy/parle

Langkah Badan Kehormatan Menegakkan Disiplin Disambut Positif

Langkah-langkah Badan Kehormatan DPR RI dalam menegakkan kode etik dan citra Dewan, disambut baik Pimpinan DPR RI. Banyak keputusan Badan Kehormatan yang cukup positif, terutama dalam hal penegakan disiplin para anggota Dewan.

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie beberapa waktu lalu dalam Rapat paripurna DPR RI pada acara Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2011-2012. Lebih lanjut Ketua DPR RI mengatakan, Usulan Badan kehormatan untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan Kode Etik dan Tata Beracara

adalah sejalan dengan rencana revisi UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang saat ini RUU nya sedang dipersiapkan oleh Badan Legislasi DPR.

Untuk menjadikan parlemen yang akuntabel katanya, tidak sekedar mengubah peraturan perundang-undangan, tetapi yang terpenting

bagaimana setiap Anggota menyadari tugas konstitusional yang diemban oleh setiap anggota DPR.

“Apapun yang kita lakukan akan menjadi tolok ukur bagi masyarakat untuk menilai terhadap wakil-wakil yang telah mereka pilih dalam Pemilu Legislatif” tegas Ketua DPR RI. (ddg)foto:wy/parle

Pencetakan Sawah Baru di Maluku Harus Diprioritaskan

“Selama ini Maluku hanya merupakan daerah penyaluran bukan daerah produksi. Sehingga selama ini bahan pangan di datangkan dari luar Maluku terutama Sulawesi & Jawa. Karenanya komisi IV mendukung upaya pencetakan sawah baru, terutama di daerah pulau Buru.”ujarnya.

Selain itu, Romahurmuziy menambahkan, di sektor kelautan Maluku sudah menjadi lumbung ikan nasional. Namun sayangnya anggaran yang diperlukan belum terealisasi.

“Dukungan anggaran untuk merealisasikan master plan lumbung ikan nasional itu belum terlihat. Untuk itu diperlukan dukungan anggaran, pertama untuk sarana pelabuhan di 12 titik, dalam rangka mendukung lumbung ikan nasional, yang kedua dalam rangka meningkatkan sarana penangkapan ikan bagi nelayan.”

Ketika mengadakan pertemuan dengan tim kunjungan kerja komisi IV, Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu mengatakan, Pemerintah provinsi Maluku melakukan percepatan pembangunan. Hal ini di dasarkan pada visi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2008-2013, yaitu membangun Maluku yang rukun, membangun Maluku yang sejahtera, pembangunan demokrasi, dan pembangunan penegakan hukum.

“Ada 11 langkah – langkah kebijakan strategis yang ditempuh pemerintah Maluku. Yaitu, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan iklim investasi dan usaha, peningkatan ketersediaan energi, percepatan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan penanganan pasca konflik, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan ketahanan pangan, pengembangan infrastruktur, reformasi birokrasi dan tata kelola serta peningkatan kinerja aparatur, pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, serta Pengembangan kebudayaan kreativitas dan inovasi teknik,”katanya.

Sementara, Anggota dari komisi IV DPR RI, Mochamad Jafar Hafsa mengatakan, salah satu masalah yang

Wakil Ketua Komisi IV DPR sekaligus tim rombongan Kunker Romahurmuziy mengatakan, pemerintah harus memberikan perhatian khususnya pada sektor pertanian, terutama untuk pencetakan sawah baru.



Tim Komisi IV DPR saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Maluku

dihadapi Provinsi Maluku adalah kebutuhan beras yang belum mencukupi. Namun, saat ini sudah ada lahan siap cetak yang sudah disediakan di Pulau Buru.

“60% stok beras di Maluku masih di datangkan dari luar (dari Provinsi lain). Untuk menyelesaikan masalah ini, saat ini sudah tersedia lahan yang siap cetak di pulau buru. Sistem irigasi juga sudah selesai dibangun. Luas sawah baru yang dapat di cetak bisa sekitar 10-20 juta hektar. Namun, pemerintah juga harus fokus dan menentukan dengan jelas siapa yang akan diberikan lahan baru itu. Jika program ini berhasil, swasembada beras bisa tercapai dan bisa dikirim ke daerah lain,”ujarnya.

Di sisi lain, anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi Gerindra Budi Heryadi, menyoroti tentang masalah belum efektifnya tempat karantina tumbuhan dan hewan yang ada di Maluku. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat me-

ngenai tempat karantina ini.

Dia menambahkan, Karantina yang ada di Maluku ambon ini sudah ada sejak april 2008 sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian Permentan No 22 tahun 2008. “Tempat tersebut dibiayai oleh APBN. Namun, tempat ini belum efektif terpakai. Karena selama ini masyarakat belum mengetahui mengenai keberadaan karantina. Untuk itu perlu ada sosialisasi pada masyarakat agar masyarakat tahu fungsi karantina,”paparnya.

Kunjungan spesifik anggota komisi IV DPR RI dipimpin oleh Romahurmuziy (F-PPP) dengan anggota: Ali Yacob (F-PD), Yusran Aspar (F-PD), Mochamad Jafar Hafsa (F-PD), I Gusti Ketut Adhigura (F-PG), Honing Sanny (F-PDIP), Habib Nabel Al Musawwa (F-PKS), Hendra S. Singkarru (F-PAN), Zainat Tauhid Sa’ad (F-PPP), Miraty Dewaningsih (F-PKB), serta Budi Heryadi (F-Gerindra).(roy/Tvp) foto:parle

DPR Diminta Perjuangkan Program PKH dan KUBE Gorontalo

Pemerintah Provinsi Gorontalo meminta kepada Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI untuk memperjuangkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Gorontalo.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Gorontalo Ruslie Habibie saat pertemuan dengan Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII ke Provinsi Gorontalo yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Radityo Gambiro di Gedung Wanita Balelimbui, Gorontalo, Senin malam (16/4) “Kami harapkan saat pembahasan anggaran di pusat, Gorontalo mendapatkan prioritas,” kata Ruslie.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Baihaki Natsir yang turut hadir pada pertemuan tersebut, menjelaskan masih ada satu kabupaten yang belum mendapatkan program PKH yaitu Pohuwato.

Untuk Program KUBE, dijelaskan bahwa masih banyak masyarakat Gorontalo yang tinggal di bukit-bukit, jika tidak di relokasi dikhawatirkan banyak terjadi penggundulan hutan akibat ladang berpindah sehingga dapat mengakibatkan longsor. “Kami juga telah mengusulkan 1000 rumah layak huni, karena faktanya masyarakat Gorontalo

mayoritas memiliki rumah kurang layak, sementara setiap program telah kami usulkan dengan melampirkan proposal by name, by photo,” tambahnya.

Ketua Tim Gondo Radityo Gambiro menjawab bahwa APBNP 2012 sudah ditetapkan, namun Komisi VIII berjanji akan mempertanyakan hal tersebut saat Rapat Kerja dengan Kementerian Sosial. Anggota DPR dari PKS Jajuli Juwaeni menjelaskan bahwa dalam pembahasan APBNP tidak ada anggaran tambahan baik untuk PKH ataupun KUBE. Fokusnya kemarin untuk mengantisipasi jika BBM naik. Sedangkan untuk PKH ada tambahan 591, tapi itu untuk menambah indeks. Namun demikian menurutnya berbagai masukan yang disampaikan akan menjadi perhatian Komisi VIII.

Saat kunjungan ke Ponpes Bubohu, tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Radityo Gambiro merasa Kagum pada Pondok Pesantren (Ponpes) bernuansa alam di Bubohu, Kabupaten Gorontalo. “Kami kagum dan bangga pada konsep alam dan religius yang diterapkan pada pondok pesantren Bubohu,” ujar Gondo saat berkunjung ke ponpes alam Bubohu pimpinan Yosef Ma’ruf, Selasa (17/4).

Pada kesempatan tersebut Gondo juga meresmikan Kartu Pos Desa Wisata Bubohu yang diterbitkan Ponpes alam tersebut. Kartu pos yang merupakan photo-photo ponpes alam dan lingkungan alam sekitar dijadikan sebagai brosur atau promosi bagi ponpes alam.

Serahkan Bantuan

Pada kesempatan ber-

beda, Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru bagi Madrasah Aliyah Muhammadiyah Molowahu Gorontalo. Bantuan sebesar Rp 197 juta dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat pendidikan madrasah Kementerian Agama diserahkan langsung Ketua Tim Gondo Radityo Gambiro saat meninjau Madrasah Aliyah Muhammadiyah di Molowahu Gorontalo, Senin (16/4).

Madrasah Aliyah Molowahu Gorontalo ditetapkan sebagai penerima bantuan karena merupakan Madrasah yang didirikan atas dana masyarakat pada 2007 dan bangunan sekolahnya dibangun dari bantuan PNPM Mandiri pada 2010.

Selain Madrasah, Tim kunjungan Komisi VIII DPR juga memberikan bantuan kepada Panti Sosial Tresna Werdha Ilomata Gorontalo. Panti sosial tersebut mendapatkan Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2012 dari Kementerian Sosial. Bantuan sebesar Rp 38.325.000 bagi 35 orang penghuni panti werdha ilomata diserahkan langsung Wakil Ketua Komisi VIII Chairunnisa saat meninjau panti tersebut, Selasa (17/4).

Chairunnisa meminta kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dan pengurus panti untuk benar-benar memperhatikan Panti dan jika memang ada kekurangan dana harap diinfokan kepada pemerintah daerah setempat. “Jika kita informasikan kepada Pemerintah daerah, saya yakin pemda akan memberikan perhatiannya, pemerintah melalui APBN hanya dapat membantu pada pemenuhan kebutuhan dasar” kata Chairunnisa. “Dibutuhkan keikhlasan dan waktu untuk mengurus panti, mengasuh manula merupakan amal ibadah yang akan mendapatkan pahala, anggap saja seperti mengurus ortu sendiri,” tambahnya. (sc) foto:parle



Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Radityo Gambiro

Sarana Prasarana MA Darussalam Bengkulu Memprihatinkan

Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah mengaku prihatin melihat Kondisi Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Darussalam. Pasalnya belum pernah sedikitpun tersentuh bantuan dari pemerintah sehingga terlihat kondisinya memprihatinkan dan tidak layak.

““ Saya sedih melihat kondisi kelas seperti ini, dan yang paling membuat saya prihatin para guru di ruangnya kekurangan kursi jadi kalau duduk bergantian,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziah saat meninjau sekolah yang terletak di pinggir kota Bengkulu, Senin (16/4/12).

Politisi Fraksi PKB ini menambahkan kondisi madrasah mengingatkannya pada anak-anak dari sekolah rusak di Provinsi Babel dalam film Laskar Pelangi. Ia berharap para santri di madrasah ini tetap punya semangat belajar seperti anak-anak dari Belitong walaupun kelasnya belum dapat diperbaiki. “Tetap semangat...,” jawab para santri yang memenuhi ruang pertemuan.

Sejak dibangun tahun 1980 Madrasah Aliyah (MA), Pondok Pesantren Darussalam, yang terletak di Desa Besar, Kota Bengkulu belum pernah memperoleh bantuan dari pemerintah. Kondisinya kelas bocor kalau hujan, plafon rusak sebagian ada yang ambruk, lubang besar diatas siswa dibiarkan menganga. Belajar pada saat hujan, para siswa harus pintar-pintar menyesuaikan posisi duduk agar tidak terkena tetesan air dari atap.

Tim Kunker Komisi VIII diantaranya Oheo Sinapoy (FPG), Ledia Hanifa (FPKS), Dewi Coryati (FPAN), Rukmini Buchori (FPDIP) terlihat mengamati beberapa ruangan dan berdialog dengan para siswa yang sebagian sedang menghadapi Ujian Nasional. Dalam ke-



Kondisi Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Darussalam Bengkulu yang sangat memprihatinkan

sempatan itu diserahkan bantuan untuk perbaikan kelas, serta kitab suci Al Quran dari Kementerian Agama.

Kepala Sekolah MA Darussalam Salikin Masud, mengatakan walaupun belajar dengan sarana yang terbatas, para santri tetap dapat meraih prestasi. Beberapa prestasi yang diraih sekolah dengan 191 murid ini diantaranya juara pidato bahasa Arab dan Inggris se provinsi Bengkulu. Tingkat kelulusan UN 100 persen untuk jurusan IPA dalam 3 tahun terakhir, sedangkan jurusan IPS berkisar 95 – 97 persen.

Sebagian alumni ada yang dapat melanjutkan pendidikan ke jengang

perguruan tinggi negeri atau swasta di Bengkulu dan Lampung. Salah seorang santri ada yang berhasil memperoleh bea siswa dari UGM Yogyakarta. “50 persen dari para santri yang sekolah disini berasal dari keluarga miskin ini dibuktikan dari surat yang ditandatangani kepala desa tempat mereka berasal,” imbuhnya.

Salikin berharap pemerintah dan DPR tetap dapat mendukung perbaikan sekolah yang dipimpinnya. Anggaran sangat diperlukan termasuk untuk memperbaiki kerusakan akibat gempa yang terjadi di Bengkulu tahun 2000 dan 2007 lalu. (iky)foto:parle

Parpol Yang Mencapai PT Pada Pemilu 2009 Langsung Sebagai Peserta Pemilu

Pansus RUU Pemilu menyepakati partai politik peserta pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu pada pemilu berikutnya.



Ketua Pansus RUU tentang Pemilu Arif Wibowo saat menyampaikan laporan hasil kerja pansus dalam Rapat Paripurna DPR

Hal ini disampaikan saat Ketua Pansus RUU Pemilu Arif Wibowo melaporkan hasil kerja Pansus dalam Rapat Paripurna, Kamis (12/4) yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.

Arif menyampaikan, terkait dengan persyaratan mengikuti Pemilu, juga telah disepakati Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Ketentuan ini menegaskan bahwa bagi partai yang mencapai angka *parliamentary threshold* 2,5% pada pemilu 2009 langsung ditetapkan sebagai peserta pemilu 2014 dengan alasan partai politik tersebut sudah membuktikan memperoleh dukungan rakyat. Persyaratan PT ini merupakan *legal policy* pembuat undang-undang dalam rangka mencapai tujuan negara.

Pada ketentuan Pasal 9 UU Pemilu ini juga menegaskan bahwa partai politik yang hendak menjadi peserta pemi-

lu dan telah menyerahkan persyaratan, dilakukan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan. Selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi dan penetapan sebagai partai politik peserta pemilu.

Arif juga menyampaikan, terkait dengan Partai Politik yang telah memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya dan ditetapkan sebagai peserta pemilu berikutnya harus dengan melampirkan dokumen persyaratan seperti yang berlaku bagi Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas pada Pemilu sebelumnya dan partai politik baru.

Persyaratan ini, kata Arif, juga harus dilengkapi dengan surat keterangan mengenai ambang batas perolehan suara DPR RI dari suara sah secara nasional pada Pemilu sebelumnya dan perolehan kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari KPU.

Selain itu, Pansus juga menyepakati pendaftaran dan proses verifikasi partai politik dilakukan 20 bulan sebelum hari

pemungutan suara dan selesai dalam kurun waktu 5 bulan, sehingga untuk pemilu 2014 diharapkan pada awal tahun 2013 sudah diketahui partai politik peserta pemilu.

Pada kesempatan tersebut Arif juga melaporkan, terdapat beberapa materi lainnya yang diangkat oleh fraksi-fraksi diantaranya adalah pembatasan belanja kampanye apapun sistem pemilu, ketentuan terhadap metode penggabungan partai politik untuk dapat mengikuti Pemilu guna menghindari praktek yang bersifat transaksional.

Selain itu, adanya keinginan kuat dari fraksi-fraksi agar undang-undang tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat berlaku untuk beberapa penyelenggaraan Pemilu.

Hal ini diusulkan dalam upaya untuk menciptakan demokrasi yang terkonsolidasi serta terjadinya institusionalisasi nilai dan aturan tentang kompetisi dan menerima sebagai landasan baku bagi kompetisi-kompetisi demokratis pada periode selanjutnya.(tt)foto:wy

Dana Kampanye Pribadi dan Kelompok di Batasi

Ketua Pansus Pemilu Arif Wibowo mengatakan, didalam ketentuan RUU Pemilu terkait dana kampanye, ditetapkan dana yang berasal dari perorangan tidak boleh lebih dari Rp. 1 Miliar dan dana yang berasal dari kelompok perseorangan dan atau badan usaha non pemerintah tidak boleh lebih dari Rp. 7.5 Miliar.

“Ketentuan ini merupakan konkordansi dengan UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik,” ujar Arif dihadapan Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung, baru-baru ini.

Terkait Metode kampanye, ujar Arif, kampanye dilakukan melalui media massa cetak dan media massa elektronik merupakan iklan kampanye. Selanjutnya dalam pasal 82 terdapat pergeseran huruf bahwa metode kampanye melalui “iklan media massa cetak dan media massa elektronik” ditempatkan tepat diatas metode kampanye rapat umum. “Kampanye pemilu dalam bentuk iklan media massa cetak dan media massa elektronik serta rapat umum dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang,”ujarnya.

Dia menambahkan, terkait larangan dalam kampanye, ketentuan pasal 86 ayat (2) tentang pelaksana



Ketua Pansus Pemilu Arif Wibowo (kanan)

kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan beberapa pihak, panja sepakat untuk menghapus anggota badan perwakilan desa. Alasannya, lanjut Arif, bahwa anggota

badan perwakilan desa sebagian juga merupakan anggota Partai Politik sehingga menjadi tidak pas jika yang bersangkutan dilarang sebagai pelaksana kampanye. (si) foto:wy/parle

Kerjasama Bilateral Harus dibarengi dengan Transfer Teknologi

Anggota DPR dari Fraksi PAN Teguh Juwarno mengharapkan kerjasama ekonomi antara Finlandia-Indonesia juga dbarengi dengan peningkatan transfer knowledge.

“Dengan adanya transfer knowledge diharapkan SDM Indonesia dapat berkompetensi dan meningkatkan pengetahuannya,” paparnya saat menerima Parlemen Finlandia dari Komite Perdagangan yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP Andi Anzhar Cakra Wijaya, di Ruang BKSAP,

Senin, (16/4).

Menurutnya, selama ini Rakyat Indonesia seringkali dijadikan market/pasar semata tanpa adanya transfer teknologi di negaranya. “Kita meminta Finlandia mengembangkan teknologi terus menerus dan ditransfer kepada negara tujuannya,”katanya.

Dia menambahkan, Industri telekomunikasi merupakan pasar bagi berbagai negara. Ponsel yang aktif sebesar 250 juta orang sementara penduduk Indonesia 240 juta. “Saya memperkirakan hampir 60 persennya menggunakan merk HP buatan Finlandia,”terangnya.



Anggota DPR dari Fraksi PAN Teguh Juwarno

Pada kesempatan itu, Parlemen Finlandia menyatakan ketertarikannya untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintah Indonesia. Pasalnya pertumbuhan Indonesia dinilai cukup

fantastis. Finlandia memiliki penduduk sekitar 5,5 juta dengan PDB 200 ribu dollar, sementara pertumbuhan ekonomi sebesar 3 persen. Sebagian besar perusahaan di Finlandia bergereak

dibidang telekomunikasi, dan kehutanan serta teknologinya, selain itu Finlandia sedang mengembangkan industri metal yang inovatif.

Saat pertemuan berlangsung, sejumlah anggota Parlemen Finlandia menanyakan mengenai hubungan antara DPR RI dengan Pers, peran perempuan di Parlemen dan mekanisme di DPR RI.

Teguh menjelaskan, terdapat 560 orang dan sekitar 106 orangnya perempuan atau 18 persen yang duduk di parlemen. “dengan keterlibatan perempuan kita mengharapkan politik bisa lebih lembut dan kesan jauh dari kekerasan,”katanya. DPR prinsipnya, sepakat mendorong semakin meningkatnya peran perempuan di DPR RI.

Sementara hubungan parlemen dengan Pers, selama ini berjalan respektif dan saling membutuhkan satu sama lain. bahkan selama ini kalangan media, sering menyoroti sepak terjang DPR RI. (si)foto:wy/parle

Pemprov Gorontalo Minta Bandara Jalaluddin Jadi Embarkasi Haji Penuh

Gubernur Provinsi Gorontalo Ruslie Habibie mengharapkan ada kepastian Bandara Jalaluddin Gorontalo untuk ditingkatkan dari Embarkasi Haji Antara (EHA) menjadi Embarkasi penuh.



Ruslie minta hal tersebut untuk diperjuangkan Komisi VIII melalui Kementerian Agama sebagai mitra kerja untuk bisa mengatasi rombongan haji dari Gorontalo.

Permintaan tersebut disampaikan Rusli saat menerima Tim Kunjungan

Kerja Komisi VIII yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Radityo Gambiro di Gedung Wanita Balelimbui, Gorontalo, Senin Malam (16/4).

Ketua DPRD Gorontalo Marthen A Taha yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menerangkan bahwa sejak 2008 Bandara Jalaluddin sudah menjadi EHA. Seluruh pengurusan haji dan asramanya di urus di Gorontalo.

“Dengan adanya EHA waktu perjalanan menjadi sedikit. Hanya menginap semalam di asrama

Gorontalo, keesokannya langsung berangkat ke Makasar. Di Makasar hanya pindah pesawat” papar Marthen.

Berbagai persyaratan dari kementerian agama dan perhubungan belum bisa dipenuhi. “Bandara Jalaluddin belum bisa didarati pesawat berbadan

besar, demikian pula dengan terminalnya masih sangat terbatas. Namun dari sisi pengurusan haji dan asrama Pemerintah Daerah telah berusaha memenuhi persyaratannya dengan membangun kamar sampai mencapai jumlah yang ditentukan dari anggaran APBD.

Yang menjadi masalah saat ini adalah bandara ex bandara hasanudin yang digunakan untuk jemaah haji sudah tidak bisa digunakan untuk haji, sedangkan bandara hasanudin baru tidak bisa digunakan untuk haji.

Ketua Tim Kom VIII Gondo Radityo Gambiro menjawab bahwa permintaan tersebut juga diminta oleh Bandara di Nusa Tenggara Barat. “Kami akan berusaha mempertanyakan hal tersebut, namun tidak hanya masalah bandara tapi juga dengan peningkatannya,” kata Gondo. (sc) foto:parle

Komisi X Setujui Tambahan APBN-P Di Kemendikbud

Komisi X DPR RI menyetujui penambahan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebanyak Rp 1,600,8 T, sehingga total APBN-P Tahun 2012 di kementerian ini sebesar Rp 12,82 triliun.

Penambahan anggaran ini sesuai dengan Keputusan rapat kerja tanggal 12 Maret 2012, dimana sebelumnya total APBN-P sebesar Rp 11.228,2 T.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X Asman Abnur dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya, Kamis (19/4) yang sebelumnya dibuka Ketua Komisi X DPR H. Mahyuddin.

Asman mengatakan, penambahan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk berbagai kegiatan di kementerian ini. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah bantuan siswa miskin, afirmasi pelayanan pendidikan di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T), Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), Klaster 4, NTT, Maluku dan Maluku Utara.

Selain itu, juga untuk kegiatan menengah universal, peningkatan daya tampung dan daya saing pendidikan tinggi, peningkatan layanan pendidikan khusus, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, penguatan layanan bahasa dan penguatan tata kelola.

Asman menyampaikan, Komisi X DPR akan melakukan pendalaman terkait dengan penambahan APBN-P ini dalam rapat dengar pendapat dengan jajaran eselon I Kemendikbud setelah masa reses (14 – 16 Mei mendatang).

Asman mengatakan, rapat yang membahas APBN-P kali ini memang berlangsung dalam suasana reses, dan ini dimungkinkan dalam Tata Tertib DPR RI setelah mendapat ijin dari Pimpinan DPR.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyampaikan, garis besar kebijakan prioritas APBN-P 2012 untuk percepatan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Na-



Wakil Ketua Komisi X DPR Asman Abnur (kanan)

sional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012.

Selain itu, kata Nuh, tambahan anggaran tersebut juga untuk mengantisipasi dampak penyesuaian harga BBM.

Namun, katanya, kebijakan prioritas APBN-P 2012 tetap harus berpegang pada kesiapan implementasi yang menjadi syarat utama.

Adapun anggaran bantuan untuk siswa miskin bertujuan untuk mencegah putus sekolah dan meningkatkan partisipasi bagi siswa pendidikan dasar. Selain itu, menjaga dan meningkatkan partisipasi dalam rangka persiapan Pendidikan Menengah Universal dan memberikan akses mahasiswa dari keluarga miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan tinggi.

Mendikbud menambahkan, afirmasi pelayanan pendidikan di daerah 3T, UP4B dan lain-lain diprogramkan dengan tujuan untuk melakukan percepatan layanan pendidikan dengan meningkatkan akses dan mutu PAUD dan Pendidikan Dasar untuk memperkecil disparitas pembangunan pendidikan dengan daerah lain.

Sementara Pendidikan Menengah

Universal juga menjadi prioritas dalam kegiatan APBN-P 2012 dengan tujuan menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka persiapan Pendidikan Menengah Universal.

APBN-P 2012 akan menyediakan tambahan daya tampung untuk 250 ribu siswa baru atau menambah 2,4% Angka Partisipasi Kasar (APK).

Penambahan APBN-P ini juga akan diperuntukkan menambah satuan biaya beasiswa pada semua anak berkebutuhan khusus, menambah cakupan bantuan operasional penyelenggaraan SLB dan inklusif serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan khusus.

M. Nuh menambahkan, tambahan APBN-P 2012 juga memberikan prioritas untuk menanamkan kecintaan dan kebanggaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa.

Integrasi kebudayaan ke dalam pendidikan memiliki konsekuensi bahwa fungsi kebudayaan harus lebih diperkuat untuk meningkatkan pendidikan karakter bangsa melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya. (tt) foto: wy/parle

Komisi VII DPR RI Soroti LNG Tangguh

Anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha (F-PG) menyoroti tingginya angka kemiskinan di Teluk Bintuni, Papua Barat mencapai 46 persen.



Tim Komisi VII DPR saat meninjau langsung LNG Tangguh dalam rangka kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat

“Ini sangat ironi sekali, padahal masyarakat setempat bersebelahan dengan LNG Tangguh yang kita anggap sebagai LNG center ketiga di Indonesia setelah LNG Arun-Aceh dan LNG Bontang-Kalimantan Timur,” ungkap Satya saat ditemui tim Parle usai meninjau LNG Tangguh, Papua Barat dalam rangka kunjungan kerja Komisi VII DPR ke Provinsi Papua Barat, Selasa (17/4).

Menurut Satya, LNG Tangguh adalah mega-proyek yang membangun kilang LNG di Teluk Bintuni-Papua Barat untuk menampung gas alam yang berasal dari beberapa blok disekitar teluk Bintuni. Seperti Blok Berau, Blok Wiriagar dan Blok Muturi. LNG Tangguh ini melengkapi pengilangan gas yang sudah ada di Indonesia, yaitu LNG Arun-Aceh dan LNG Bontang-Kalimantan Timur, jelasnya.

Ia meminta kepada pemerintah agar masalah ini dapat ditindaklanjuti dan ditangani secara serius dalam menangani pengalokasian gas domestik untuk daerah-daerah dimana LNG itu berada. Karena tidak ada alokasi gas Tangguh untuk domestik khususnya untuk daerah setempat sehingga dalam jangka pendek yang bisa dilakukan listriknya dapat digunakan untuk kepentingan sendiri. Pasalnya, Tang-

guh memiliki kelebihan pasokan, yang dapat diberikan kepada rakyat setempat sebesar 5 MW.

“Tapi kedepan tidak cukup dengan itu, kedepan kita minta supaya ada gas yang dedikasi kepada daerah setempat untuk mengembangkan tidak hanya cuma listrik tapi juga city gas (gas kota), dan itu harus bisa mengalir ke daerah Kabupaten Bintuni dimana LNG Tangguh itu berada,” pinta Satya.

Menurut Satya, pemerintah seharusnya sudah bisa merubah paradigma saat ini, dengan tidak lagi mengandalkan penerimaan negara saja tapi juga pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. “Sehingga dalam pengembangan Tangguh kedepan tidak lagi bertumpuh hanya menjual gas ke luar negeri untuk pemasukan devisa negara yang besar tetapi harus melihat yang ada disekelilingnya. Bagaimana caranya Tangguh itu berperan didalam mengembangkan atau memberikan pertumbuhan ekonomi di Papua Barat khususnya,” katanya.

Untuk itu, lanjutnya, Komisi VII menitikberatkan kepada listrik karena kekurangan supply listrik dilokasi dimana disitu merupakan sumber gas itu membeikan kecemburuan bagi masyarakat setempat. Karena masyara-

kat setempat tidak diberikan listrik dengan baik yang sementara berdekatan dengan sumber gas besar. “Ini jadi program yang harus segera direalisasikan oleh Pemerintah,” tegasnya.

Satya menambahkan, Komisi VII DPR akan memanggil Kementerian ESDM bahkan kalau bisa dalam waktu dekat akan minta adanya kunjungan spesifik dengan mengundang kehadiran Menteri ESDM atau Wamen ESDM untuk meninjau LNG Tangguh Papua Barat. “Disitu nanti Menteri ESDM atau Wamen ESDM dapat melihat langsung dan mendapatkan informasi yang detail dari daerah setempat, baik Kabupaten Bintuni maupun Pemerintah Provinsi Papua Barat,” katanya.

Menurut Satya ini sangat penting, karena permintaan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat ini harus kita difollow-upi seperti adanya city gas (gas kota), listrik yang ada disekitar daerah itu harus betul-betul kita prioritaskan.

Untuk itu, lanjutnya, Komisi VII akan merencanakan meminta kepada Kementerian ESDM agar menangani ini secara serius dan melakukan kunjungan spesifik bersama ke LNG Tangguh. “Itu menjadi program prioritas kita kedepan ini,” tuturnya.(iw)/foto: iwan armanias/parle.

Komisi VIII Dukung Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Kepahiang, Bengkulu

Tim kunjungan kerja Komisi VIII ke Provinsi Bengkulu mendukung penuh program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kepahiang.

Daerah yang memakan waktu 2 jam perjalanan darat dari ibu kota Bumi Rafflesia ini, dahulu masih masuk kategori tertinggal bahkan pernah mengalami busung lapar tahun 2003, namun saat ini kondisinya 180 derajat berbeda dibandingkan yang lalu.

“Saya terkagum-kagum mendengar paparan dari Pak Bupati, kami doakan insyaAllah petani Kepahiang akan menjadi milyarder. Kami bangga hati daerah ini terus berkembang dari daerah busung lapar, naik jadi daerah tertinggal, 5 tahun lagi ditargetkan jadi daerah milyarder,” kata Ketua Komisi VIII, Ida Fauziah dalam pertemuan di desa Kampung Bogor, Kepahiang, Bengkulu, Selasa (17/4/12).

Bupati Kepahiang Bando Amin C. Kader dalam paparannya, menyebutkan bahwa daerahnya sebenarnya sangat subur namun ironinya masyarakat terjebak dalam kemiskinan. Perjuangan untuk bangkit mendorong lahirnya program unggulan Siluna yaitu upaya budi daya pohon Singon, talas unggul dari Jepang satoimo atau disingkat lmo, kopi Luak dan buah Naga.

Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu yang sengaja dibangun di wilayah ini dilibatkan mendukung program Siluna, setiap desa rata-rata menyiapkan lahan 200 hektar dengan 3000 batang pohon Sengon/hektar. Diantara rimbunan pohon ditanam tumpang sari Talas Satoimo sebanyak 24 ribu rumpun/hektar. “Setiap desa akan didukung tenaga penyuluh pertanian dan diproyeksikan pada tahun kelima lahan 1 hektar Sengon dan Talas lmo akan menghasilkan setidaknya Rp. 1,12milyar lebih. Bayangkan kalau setiap desa punya 200 hektar,” jelasnya disambut tepuk tangan masyarakat yang memenuhi ruang pertemuan.



Tim Komisi VIII DPR saat melihat hasil pertanian di Kabupaten Kepahiang dalam rangka kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu

Untuk mendukung permodalan, lanjutnya, Pemkab Kepahiang membentuk koperasi yang bekerjasama dengan Koperasi Satmakura yang sukses dengan program yang sama di Bontang, Kaltim. Tidak seperti perkebunan swasta yang sering berkonflik dengan petani, ia meyakinkan dengan sistem koperasi masyarakat lebih diberdayakan dan tetap memiliki lahan mereka.

Seperti kita ketahui, Kayu sengon cukup laris di pasaran, banyak digunakan untuk tiang bangunan rumah, papan peti kemas, peti kas, perabotan rumah tangga, pagar, tangkai dan kotak korek api, pulp, kertas dan lain-lainnya. Tajuk tanaman sengon berbentuk menyerupai payung dengan rimbun daun yang tidak terlalu lebat. Ini ideal untuk tanaman tumpang sari dibawahnya.

Dalam pertemuan tersebut Komisi VIII DPR menyerahkan bantuan melalui Kemensos senilai Rp.600 juta kepada 20 Kelompok Usaha Bersama (Kobe) di Kabupaten Kepahiang. “Untuk mengembangkan ekonomi produktif masyarakat yang saat ini sedang digalakkan Pak Bupati, semoga pada saatnya bisa terwujud,” imbuh Ida Fauziah yang juga politisi FPKB ini.

Tim Kunker Komisi VIII diantaranya Sayed Fuad Zakaria, Oheo Sinapoy, Ledia Hanifa, Abdul Rozaq Raiz dan Dewi Coryati berkesempatan meninjau pameran produk pertanian. “Terasa segar tidak seperti buah supermarket di Jakarta,” kata Sayed Fuad Zakaria dari FPG, usai mencicipi buah naga hasil panen petani yang dipamerkan. Rombongan juga dipandu untuk melihat lahan perkebunan dan kebun pembibitan. (iky)foto:parle

Komisi VII Ingin Pembangunan Pabrik Pupuk di Sulbar

Komisi VII DPR RI menilai dengan didukung potensi gas yang ada di Block Sebuku di wilayah pulau Laria-Lariang, diharapkan pembangunan pabrik pupuk di provinsi Sumatera Barat segera dibangun.



Wakil Ketua Komisi VII zainuddin amali saat melakukan pertemuan dengan pemprov Sulbar

Sulbar sebagai provinsi harus ada industri, harus ada keadilan. Sulbar juga merupakan koridor ekonomi, yang memiliki daerah pertanian dan perkebunan yang banyak terdapat wilayah Sulbar, sehingga sudah sepatutnya pabrik pupuk juga di bangun di provinsi ini. “Apabila hal ini terjadi maka pabrik ini akan menjadi pabrik pertama yang ada di Indonesia bagian timur,” tegas Nazaruddin saat mengikuti kunjungan kerja Komisi VII di Provinsi Sulbar, Selasa (17/4).

Dukungan juga terlontar dari Nazaruddin Kiemas, yang mengatakan Setelah mempelajari ternyata jika pipa ditarik ke provinsi lain itu 340 km, hampir tiga kali lipat dibanding ke Sulbar. Dia mengungkapkan bahwa pabrik tambahan pupuk kaltim itu sendiri belum di bangun. “Jadi kalo belum dibangun toh haknya tetap sama untuk PKT tapi di bangunnya di Sulbar. Jadi hak gasnya tetap sama. PKTnya pun ada keuntungan pipanya lebih pendengaran maka biayanya lebih murah,” paparnya.

Memang ada masalah teknis masalah palung namun menurut masukan para ahli hal itu dengan teknologinya dapat teratasi. Untuk pemerintah costrecovery hanya sepertiganya. Jadi

saling menguntungannya dan untuk Sulbar belum ada industri.

Wakil ketua Komisi VII Zainudin Amali menegaskan, akan berkoordinasi dengan komisi VI DPR yang membidangi industri dan BUMN, supaya bagian dari pupuk kaltim yang holding ada di Pusri dapat dilakukan di Sulbar, mengenai keterlambatan dapat diteloransi sampai dua tahun, namun efeknya masyarakat merasakan secara langsung apa yang terkandung di dalam perut bumi mereka.

Dia menambahkan dibanyak tempat kenapa tidak memberikan dukungan penuh, apa itu minyak, gas, atau lainnya, karena mereka tidak merasakan secara langsung. Tempatnya dieploitasi SDA, tapi tidak merasakan manfaatnya. Menurut Zainudin, Kita harus merubah paradigma itu, apa yang utama yang kita makmurnya dimana tempat dimana tempat SDA itu ada. Itu merupakan kewajiban kami melihat secara obyektif. (as) Foto: Agung Sulistiono.



Tim Kunker Komisi VII DPR ke Provinsi Sulbar

Pimpinan BKSAP Berharap Kunjungan Parlemen Finlandia Pererat Kerjasama Antar Parlemen

Wakil Ketua BKSAP Andi Anzhar Cakra Wijaya berharap kunjungan Parlemen Finlandia dapat membawa dampak positif untuk mempererat hubungan kerjasama antar parlemen dan hubungan antar kedua negara.

“Kami berharap melalui pembentukan grup persahabatan dan program saling mengunjungi, komunikasi antara DPR RI dan Parlemen Finlandia akan senantiasa berjalan selaras dan harmonis,” katanya.

Parlemen Indonesia juga berharap, kunjungan delegasi Finlandia ke Indonesia dapat memberikan kontribusi yang besar bagi Finlandia dan Indonesia,” tambahnya saat memberikan sambutan pada acara ramah tamah di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (17/4).

Andi mengatakan, di era global sekarang ini mobilitas masyarakat semakin dinamis sehingga tantangan juga semakin kompleks. Konflik yang melanda beberapa kawasan di dunia, kejahatan transnasional, pemanasan global, bahaya kelaparan dan kemiskinan hanyalah sebagian kecil tantangan yang harus dihadapi masyarakat internasional.

Namun, katanya, kita yakin berbagai tantangan tersebut akan dapat dihadapi jika bekerjasama mencari pemecahannya. Kerjasama akan dapat memberikan kontribusi positif jika didukung segenap lapisan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, parlemen sebagai lembaga legislatif harus berperan aktif mendukung kerjasama antar bangsa dan negara. Oleh karena itu, dia yakin komunikasi yang baik akan dapat menghindarkan dari kesalahpahaman dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak



Wakil Ketua BKSAP Andi Anzhar Cakra Wijaya saat menerima Ketua Komisi Perdagangan Parlemen Finlandia Mauri Pekkarinen

untuk belajar dan menghargai perbedaan. Menurut Andi, perbedaan yang ada hendaknya bukan menjadi penghalang namun justru menjadi perekat hubungan antar bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi Perdagangan Parlemen Finlandia Mauri Pekkarinen menyampaikan kekagumannya akan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat baik.

Oleh karena itu, katanya, Finlandia merespon dengan baik untuk dapat bekerjasama khususnya di sektor perdagangan. Selain itu, Finlandia berpendapat bahwa bangsa Indonesia kaya dengan sumber daya alam. Sedangkan Finlandia mempunyai teknologi yang dapat mengelola sumber daya alam agar dapat digunakan lebih baik lagi.

Walaupun Finlandia negara kecil, namun Finlandia memiliki teknologi

yang maju dan bahkan di beberapa sektor memiliki teknologi yang sangat canggih dan bisa membantu Indonesia dalam hubungan kerjasama.

Mauri juga menyampaikan, bangsa Eropa khususnya sangat menghargai pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, pertumbuhan demokrasi di Indonesia sangat signifikan.

Indonesia, kata Mauri, memiliki peran penting dalam proses perdamaian secara global. Untuk itu kolaborasi antara Finlandia dan Indonesia akan berdampak baik sekali. Berkaitan dengan hubungan bilateral antara Indonesia dan Finlandia, dalam hal ini Parlemen Finlandia sedang membentuk hubungan bilateral tersebut.

“Saat ini di Parlemen kami sedang membentuk hubungan bilateral antara Finlandia dan Indonesia dan kami menanganinya secara serius,” kata Mauri. (tt,wy)foto:wy/parle



Tim Kunker (Kunjungan kerja) Komisi VII yang dipimpin Milton Pakpahan melakukan pertemuan dengan PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) dan jajaran Pemprov Papua Barat di Manokwari, 16 April 2012. Foto IW



Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI yang dipimpin Zainudin Amali melakukan peninjauan ke Sulawesi Barat, diterima Gubernur beserta jajarannya di Mamuju, 17 April 2012. Foto:AS



Tim Kunlap (Kunjungan Lapangan) komisi X meninjau pelaksanaan Ujian Nasional ke beberapa Sekolah Menengah Umum di Bali, 16 April 2012. Foto:NT

